



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBELUM
DAN SESUDAH PENERAPAN PP NO 23 TAHUN 2018 PADA KOPERASI
HARAPAN MULYA KELURAHAN KEPENUHAN TENGAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH :

NANI YUMIARTI
NIM. 11673200079

**KONSENTRASI AKUNTANSI PERPAJAKAN
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**


2020

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NANI YUMIARTI
 NIM : 11673200079
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 KOSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 SEMESTER : IX (SEMBILAN)
 JUDUL : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
 SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP NO 23 TAHUN 2018
 PADA KOPERASI HARAPAN MULYA KELURAHAN KEPENUHAN
 TENGAH KABUPATEN ROKAN HULU

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING


Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak
 NIP. 19791010 200710 2 011

MENGETAHUI


 DEKAN
Dr. Drs. H. Muk. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN


Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA
 NIP. 19780808 200710 1 003

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NANI YUMIARTI
NIM : 11673200079
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
SEMESTER : IX (SEMBILAN)
JUDUL : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP NO
23 TAHUN 2018 PADA KOPERASI HARAPAN MULYA
KELURAHAN KEPENUHAN TENGAH KABUPATEN
ROKAN HULU
HARI/TANGGAL UJIAN : KAMIS / 17 DESEMBER 2020

DISETUJUI OLEH**KETUA PENGUJI**

NASRULLAH DJAMIL, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19780808 200710 1 003

MENGETAHUI**PENGUJI I**

Dr. DONY MARTIAS, SE, MM
NIP. 19760306 200710 1 004

PENGUJI II

JASMINA SYAFEE'I, SE, M.Ak, CA
NIP. 19750307 200701 2 019



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Dan Sesudah Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Pada Koperasi Harapan Mulya Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu

OLEH:

NANI YUMIARTI
NIM: 11673200079

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perhitungan pajak penghasilan badan sebelum dan sesudah diterapkan PP No 23 Tahun 2018 pada Koperasi Harapan Mulya Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Adapun jenis data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Harapan Mulya sebelum di terapkan PP No 23 Tahun 2018 dikenakan pajak penghasilan pasal 17 UU No 36 tahun 2008 dan PP No 46 tahun 2013. Besarnya PPh terutang yang dibayar oleh Koperasi Harapan Mulya untuk tahun 2018 jika menggunakan perhitungan PP 46 tahun 2013 dan UU No 36 tahun 2008 didapatkan hasil bahwa lebih kecil bila menggunakan skema perhitungan PP 46 tahun 2013. Selanjutnya Setelah di terapkan PP No 23 Tahun 2018 Koperasi Harapan Mulya masih menggunakan PP No 46 tahun 2013 dengan tarif 1% yaitu pada tahun 2019 atas pendapatanya sebesar Rp.132.520.000 Koperasi Harapan Mulya di kenakan pajak sebesar Rp.1.325.200. Namun jika melihat Peraturan Pemerintah sekarang atas Pph final untuk usaha mikro kecil menengah yaitu PP No 46 Tahun 2013 telah berubah menjadi PP No 23 Tahun 2018. Sehingga kopeasi harapan mulya seharusnya sudah dikenakan pajak atas PP No 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5%.

Kata kunci: PP No 23 Tahun 2018 , PP No 46 Tahun 2013, UU No 36 Tahun 2008, PPh Terutang

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahrabbi"alamin, segala puji serta syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, hidayah, kegigihan, kesehatan, kekuatan, kemudahan dan kasih sayang-Nya yang tiada batas kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Dan Sesudah Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Pada Koperasi Harapan Mulya Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu"**.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan, yang kita rasakan sekarang ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari bantuan, baik moril maupun materil serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Staf.
2. Ayahanda Rosidi, Ibunda Kasmanah, serta Abangku Rusyadi dan Wahyudin, Kakakku Wiwin winarti, Nia Kurniati, Maryani dan Adik-adikku Siti Dewi Lestari dan Nala Alfianjani beserta seluruh keluarga besar penulis, yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta doa dalam setiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- detik kehidupan untuk kebahagiaan dan kesuksesan penulis, sehingga penulis dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta Staf.
 4. Ibu Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan I, Ibu Juliana, SE, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Amrul Muzan, S.HI, MA selaku Wakil Dekan III.
 5. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Ibu Aras Aira, SE, M. Ak selaku Penasehat Akademis, yang telah banyak memberikan bantuan dan nasehat selama Perkuliahan.
 7. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M. Ak. Ak selaku dosen konsultasi proposal dan pembimbing skripsi, yang telah banyak memberi bantuan dan arahan serta bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran, dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini.
 8. Bapak dan Ibu dosen yang telah turut serta dalam memberikan masukan dan membantu penulis dalam memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, dan seluruh staf dan pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu kelancaran urusan dalam suasana keakraban dan kekeluargaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



9. Pengurus dari Koperasi Petani Sawit Sumber Rezeki Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data-data yang diperlukan dalam membuat skripsi ini.

10. Sahabat-sahabatku Siti Robiatul Adawiyah, Nanya Jesika Ananda, Putri Noviasari, Indah Nurafifah, Selvia Azura, Siyfa Utami Putri, Ulya Mawadda dan Siti Rahmani. Terima kasih untuk segalanya mudah-mudahan persahabatan ini selalu terjalin buat selamanya.

11. Teman-Teman Akuntansi C Angkatan 2016, teman-teman Konsentrasi Perpajakan B yang telah memberi semangat dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

12. Dan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan. Sehingga memerlukan penyempurnaan sedemikian rupa. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 06 November 2020
Penulis

NANI YUMIARTI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Masalah	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB 11 LANDASAN TEORI	
1.1 Konsep Dasar Akuntansi	11
2.1.1 Pengertian Akuntansi.....	11
2.1.2 Laporan Keuangan.....	12
2.2 Kosep Dasar Koperasi	14
2.2.1 Pengertian Koperasi	14
2.2.2 Tujuan Koperasi	17
2.2.3 Fungsi dan Peran Koperasi	18
2.2.4 Laporan Keuangan Koperasi	19

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Konsep Dasar Pajak	21
2.3.1	Pengertian Pajak	21
2.3.2	Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pemungutan Pajak	22
4	Pajak Penghasilan Badan	25
2.4.1	Pengertian Pajak Penghasilan	25
2.4.2	Subjek Pajak Penghasilan	26
2.4.3	Objek Pajak Penghasilan	28
2.4.4	Pengurangan Penghasilan Bruto	34
2.4.5	Penghasilan Yang dikenakan Tarif Final	39
2.4.6	Rekonsiliasi Fiskal	40
2.4.7	Penentuan Penghasilan Kena Pajak	43
2.4.8	Tarif Pajak	45
2.4.9	Tarif Tunggal	47
5	Perkembangan Peraturan Pajak	48
2.5.1	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	53
2.5.2	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	68
6	Pajak dalam pandangan Islam	91
7	Penelitian Terdahulu	94
BAB III METODE PENELITIAN		
1	Lokasi Penelitian	98
2	Jenis dan Sumber Data	98
3	Metode Pengumpulan Data	98



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Analisis Data	99
-------------------------	----

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Koperasi.....	100
4.2 Visi dan Misi	100
4.3 Struktur Organisasi	101

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pajak penghasilan badan sebelum diterapkan PP No 23 Tahun 2018..	104
5.2 Pajak penghasilan badan setelah di terapkan PP No 23 Tahun 2018. ..	112

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	118
6.2 Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA	120
-----------------------------	------------

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

2.1	Tarif Progresif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	46
2.2	Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	49
2.3	Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	50
2.4	Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	51
2.5	Tarif Pajak Wajib Pajak Badan	51
2.6	Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri	52
5.1	Skema perhitungan PPh terutang 2018 berdasarkan UU 36 tahun 2008..	105
5.2	Skema Laporan Perhitungan Hasil Usaha	110
5.3	Skema perhitungan PPh terutang 2018 berdasarkan PP 46 tahun 2013 ..	111
5.4	Skema perhitungan PPh terutang 2019 berdasarkan PP 46 tahun 2013 ..	114
5.5	Skema perhitungan PPh terutang 2019 berdasarkan PP 23 tahun 2018 ..	116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Secara Umum laporan keuangan meliputi ikhtisar-ikhtisar yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas serta perubahan ekuitas sebuah organisasi dalam satu periode waktu tertentu. Salah satu dari laporan keuangan adalah laporan laba rugi atau perhitungan hasil usaha. Laporan laba rugi melaporkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu berdasarkan konsep pembandingan. Konsep ini diterapkan dengan membandingkan beban dan pendapatan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut.

Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan komersial pada dasarnya disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan komersial ditunjukan untuk pihak intern dan ekstern. Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi, apakah selama periode tersebut terjadi kenaikan atau penurunan aktivitas usaha yang tercermin dari pendapatan (hasil usaha), yang

selanjutnya akan menghasilkan kenaikan (penurunan) laba usaha dari periode sebelumnya.

Dengan mengadakan analisa laporan keuangan dari perusahaan, manajemen akan mengetahui keadaan dan perkembangan *financial* dari perusahaannya, dimana hasil analisa historis tersebut sangat penting artinya bagi penyusunan rencana ataupun kebijakan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Sedangkan untuk pihak eksternal, dalam hal ini khususnya adalah pemegang saham yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, terutama berapa besar deviden yang akan diterima serta untuk memutuskan apakah manajemen perusahaan tetap dipertahankan. Disamping hal tersebut, laporan keuangan sudah pasti akan digunakan untuk memutuskan apakah diperlukan ekspansi usaha pada periode-periode selanjutnya.

Besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan salah satu informasi yang perlu diketahui oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan didalam dan diluar perusahaan. Bagi pihak dalam perusahaan, informasi ini berguna untuk mengatur aktivitas perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan sedangkan bagi pihak luar perusahaan terutama pemerintah, informasi ini digunakan untuk menetapkan kebijakan dalam perpajakan terutama dalam hal perhitungan dan penetapan besarnya pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutang yang harus disetor ke kas Negara untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam membiayai pembangunan Negara.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala bidang terutama bidang ekonomi. Pembangunan ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat biasa yang sering disebut dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat terlaksanakan dengan baik apabila ada dana yang tersedia, pemerintah membutuhkan sangat banyak dana untuk melakukan kegiatan pembangunan tersebut. Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber dana yang cukup bagi negara untuk biaya pembangunan negara. Dalam hal ini, pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Penerimaan pajak menjadi suatu peran yang sangat penting bagi negara oleh karena itu Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang merupakan bagian dari instansi pemerintahan dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia mengatur cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Berbagai cara dilakukan oleh Dirjen Pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan Indonesia dapat mengalami penyederhanaan tarif pajak, penghasilan kena pajak dan sistem pemungutan pajak (Ramandiansyah, et.al, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment*, artinya wajib pajak harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajibannya dalam pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku serta sesuai dengan kebutuhan wajib pajak tersebut. Dalam pelaksanaannya, sistem pemungutan pajak berdasarkan *system self assessment* ini mengandung banyak kelemahan. Salah satunya adalah sering disalah gunakan oleh wajib pajak untuk melakukan kecurangan, misalnya memanipulasi restitusi pajak atau mengurangi hutang pajak yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan selain tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah, juga disebabkan masih rumitnya prosedur pembayaran pajak.

Peraturan pemerintah dalam undang-undang perpajakan juga menjadi salah satu faktor kepatuhan wajib pajak, dalam membayar dan melaporkan penghasilannya. Namun terkadang, pemerintah mengubah peraturan undang-undang perpajakan dari perubahan tarif sampai dengan perubahan syarat-syaratnya untuk meningkat penghasilan pemerintah dari sektor pajak. Seperti peraturan pajak yang mengatur para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), awalnya pemerintah memberlakukan peraturan pajak khusus untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yaitu Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Pajak atas usaha kecil menengah yang telah diberlakukan di Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintahan No 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013, tentang pajak penghasilan usaha mikro kecil menengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(UMKM) dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013 dengan ketentuan tarif PPh final sebesar 1% dikenakan atas penghasilan bruto, berlaku untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dan badan diluar bentuk usaha tetap, pendapatan berasal dari kegiatan usaha, bukan dari pekerjaan atau sebagai individu profesional, dan memiliki penghasilan bruto tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak.

Adanya prokontra terkait dengan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013, aspek keadilan merupakan salah satu kontra yang sering disoroti mengingat pajak penghasilan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 termasuk dalam pajak final. Sedangkan pajak final sendiri tidak memandang apakah hasil akhir dari usaha Wajib Pajak tersebut laba atau rugi, sepanjang Wajib Pajak memiliki omset maka Wajib Pajak harus membayar pajak. Dalam kondisi akhir penghasilan bersih dalam satu tahun kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Wajib Pajak pribadi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) tetap membayar pajak sedangkan Wajib Pajak orang pribadi karyawan tidak membayar pajak (www.pajak.go.id).

Banyak Wajib Pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) mengeluh terkait tarif 1% dari omset tersebut, maka dari itu Presiden Joko Widodo mengajukan usulan untuk menurunkan tarif pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pada 1 Juli 2018 telah diterbitkan menjadi Peraturan Pemerintahan No 23 Tahun 2018. Salah satu yang berubah dari peraturan pemerintah ini adalah perubahan tarif 1% menjadi tarif 0.5% dari peredaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bruto yang belum dikurangi dengan biaya-biaya dan berjumlah tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun. Namun, pengenaan tarif pph final 0,5% memiliki batas waktu. Kebijakan tentang PPh Final 0,5% memiliki tenggang waktu atau batas waktu. Ini merupakan salah satu hal yang membedakan dengan peraturan sebelumnya. Berikut ini adalah sebagai berikut: 4 tahun pajak untuk Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, atau Firma dan 3 tahun pajak untuk Wajib Pajak Badan Terbatas. Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan ketentuan tarif normal yang ditetapkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong Wajib Pajak agar mengatur pembukuan dan pengembangan usaha.

Subyek Pajak yang dapat menggunakan peraturan ini adalah Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Adapun kelompok wajib pajak yang diperbolehkan menggunakan aturan ini adalah Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, sepanjang wajib pajak ini bukan : Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (Za), atau pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keahlian khusus menyerahkan jasa yang dikecualikan sebagai obyek pajak pada aturan PP No 23 Tahun 2018. Wajib Pajak badan yang memperoleh fasilitas Pajak Psnghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya: dan Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

Peraturan Pemerintah ini berlaku untuk semua penghasilan badan usaha termasuk Koperasi Harapan Mulya. Hal ini terkonfirmasi oleh anggota pengurus Koperasi Harapan Mulya bahwa Koperasi Harapan Mulya memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Namun Koperasi Harapan Mulya belum menggunakan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, tetapi masih menggunakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dengan tarif 1%.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Pada Koperasi Harapan Mulya Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang penelitian tersebut, maka yang menjadi permasalahan pokok dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Pada Koperasi Harapan Mulya Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu?”

1.3 Tujuan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan laporan keuangan Koperasi Harapan Mulya atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data dan melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Dan Sesudah Penerapan PP No 23 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dan melatih penulis untuk mengungkapkan permasalahan tertentu, serta berusaha memecahkan permasalahan tersebut secara sistematis sehingga dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan pertimbangan atau masukan mengenai perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Bagi aparat pajak/fiskus, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak dan masukan-masukan guna meningkatkan pendapatan pajak.
- d. Bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan referensi bagi beberapa penelitian dengan objek peneliti yang sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai kerangka acuan untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini, maka kerangka penulisan atau sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang terdiri dari teori yang dikutip dari buku yang akan menjadi acuan atau pendukung dalam pembahasan skripsi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat berdirinya perusahaan, struktur organisasi, dan aktivitas/kegiatan usaha Koperasi Harapan Mulya.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan cara membandingkan teori yang dibahas dengan prakteknya yang dibuat oleh koperasi.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan penulis dari penelitian dan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi koperasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Akuntansi

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Lili (2006:2) akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut. Selanjutnya, menurut Lubis (2017:63), definisi yang diberikan oleh *American Institute Certified Public Accountant* (AICPA) pada tahun 1887 menyatakan sebagai berikut: “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut”.

Ditinjau dari segi prosedur, akuntansi adalah suatu teknik atau seni untuk mencatat, menggolongkan, menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang serta menganalisis hasil dari teknik tersebut.

Dari pengertian akuntansi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan akuntansi meliputi:

1. Pencatatan

Pencatatan adalah kegiatan untuk mengadakan pencatatan atas transaksi keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokumen (bukti transaksi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti: nota, kuitansi, cek, dan lain-lain) ke dalam buku harian (jurnal) yang tersedia pada perusahaan dengan cermat dan kronologis.

2. Penggolongan

Penggolongan merupakan kegiatan mengelompokkan transaksi keuangan perusahaan ke dalam akun buku besar.

3. Peringkasan

Peringkasan merupakan kegiatan untuk meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan ke akun buku besar (pada bagian b) kedalam neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, menutup buku besar, neraca saldo setelah penutup, dan jurnal pembalik.

4. Pelaporan

Pelaporan yang dimaksud adalah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan laba ditahan, neraca, laporan perubahan modal/ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.2 Laporan Keuangan

Menurut Nayla (2013:9) laporan keuangan menurut adalah catatan keuangan perusahaan selama kurun waktu tertentu yang artinya, segala aktivitas perusahaan, baik yang mencatat pemasukan maupun pengeluaran, merupakan data yang harus dicatat di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya dikenal beberapa macam laporan keuangan seperti:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Neraca.
2. Laporan Laba-Rugi.
3. Laporan Perubahan Modal.
4. Laporan Catatan atas laporan keuangan.
5. Laporan Kas.

Selanjutnya, menurut *Accounting Principles Board Statement No.4* dalam Hery (2009:6), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan.
2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba.
3. Menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan/potensi perusahaan dalam memperoleh atau menghasilkan laba.
4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban.
5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan.

Menurut Sukardi dan Kurniawan (2010:187) manfaat laporan keuangan adalah:

1. Bagi manajemen, sebagai dasar memberikan kompensasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi pemilik perusahaan, sebagai dasar untuk menilai peningkatan nilai perusahaan.
3. Bagi supplier, untuk mengetahui besarnya kemungkinan pembayaran utang.
4. Bagi bank, sebagai bukti bahwa perusahaan itu *liquid* dan mempunyai *working capital*.

2.2 Kosep Dasar Koperasi

2.2.1 Pengertian Koperasi

Menurut Subandi (2015 : 19) Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan ayat (4) dikemukakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan”, sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25/1992, yang dimaksud koperasi di Indonesia adalah: badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut M. Iskandar soesilo dalam Asharullah (2013:19), koperasi juga memiliki ide dasar yaitu suatu cita-cita yang ingin dicapai. Ide koperasi telah berkembang jauh sebelum koperasi itu sendiri wujud. Ide yang berasal dari berbagai pandangan itu kemudian melebur ke dalam prinsip-prinsip, asas-asas, atau sendi-sendi dasar koperasi.

Ide dasar koperasi adalah kerjasama yang memang bukan halbaru. Bahkan secara universal, mungkin sama panjangnya dengan sejarah umat manusia itu sendiri. Sebagai anggota masyarakat, seseorang tentu memiliki naluri untuk bekerja sama dan tolong menolong.

Bentuk kegiatan koperasi dapat seperti berikut:

1. Koperasi Simpan Pinjam
2. Koperasi Serba Usaha
3. Koperasi Unit Desa

Koperasi unit desa merupakan koperasi diwilayah pedesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Koperasi unit desa dapat juga dikatakan sebagai wadah organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Koperasi unit desa dapat juga disebut sebagai koperasi serba usaha karena berusaha memenuhi berbagai bidang seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran dan jasa.

Koperasi unit desa diharapkan dapat menjadi tiang perekonomian serta mampu berperan aktif untuk memperluas perekonomian skala kecil dan usaha keluarga di desa, dengan cara membantu menyalurkan sarana produksi dan memasarkan hasil pertanian. Selain itu koperasi unit desa juga diharapkan dapat memberikan bimbingan teknis kepada petani yang masih menggunakan teknologi tradisonal yaitu dengan mengadakan penyuluhan dan kursus bagi petani. Bimbingan dan penyuluhan bagi para petani sangat dibutuhkan karena untuk meningkatkan produksi hasil pertanian. Dengan adanya hal tersebut diharapkan tujuan akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan bagi petani yang ada wilayah pedesaan.

Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu sebagai pemilik sekaligus pengguna (*user own riented*). Oleh karena itu:

1. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi utama.
2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.
4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggotanya.
5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non anggota koperasi.

2.2.2 Tujuan Koperasi

Menurut Asharullah (2013:24) Tujuan adalah merupakan cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita koperasi Indonesia terikat pada landasan adil, struktural dan operasionalnya. Keterikatan inilah yang menjadi arah, tahapan, dan proses dalam mewujudkan tujuan koperasi Indonesia yang terlihat pada UU No. 17 Tahun 2012 pasal 4 yaitu berbunyi : “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi Indonesia memiliki arah dan amanat sebagai berikut:

1. Koperasi diharapkan mampu menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Koperasi diharapkan mampu menjadi bagian utama dalam struktur dan sistem perekonomian nasional.
3. Koperasi diharapkan mampu menjadi cerminan demokrasi ekonomi nasional yang berkeadilan.

2.3 Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi koperasi antaralain yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan anggota untuk memajukan kesejahteraan.
2. Membangun sumber daya anggota dan masyarakat.
3. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota.
4. Mengembangkan aspirasi ekonomi anggota dan masyarakat dilingkungan kegiatan koperasi.
5. Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang ekonomi secara optimal.

Sementara fungsi Koperasi untuk Indonesia yang tertuang dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dan peranan koperasi antara lain:

1. Wadah peningkatan taraf hidup dan ketangguhan berdaya saing para anggota dan masyarakat dilingkungannya.
2. Bagian integral dari sistem ekonomi nasional.
3. Pelaku strategis dalam sistem ekonomi rakyat.
4. Wadah pencerdasan anggota dan masyarakat di lingkungannya.

2.2.4 Laporan Keuangan Koperasi

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia Tahun 2009 (PSAK No. 27

Tahun 2009), laporan keuangan komersial (koperasi) terdiri dari:

1. Perhitungan Hasil usaha (laporan laba rugi)

Adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi.

2. Neraca

Adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki koperasi (aset, kewajiban, dan ekuitas), serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Laporan arus kas

Adalah suatu laporan mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar selama suatu periode tertentu, yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada suatu periode.

4. Laporan promosi ekonomi anggota

Adalah laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama satu periode tertentu. Laporan tersebut mencakup 4 unsur, yaitu:

- a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama
- b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama
- c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
- d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

5. Catatan atas laporan keuangan.

Adalah suatu informasi yang menyajikan pengungkapan (*disclosures*) yang memuat:

- a. perlakuan akuntansi, antara lain mengenai:
 - 1) Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
 - 2) Kebijakan akuntansi tentang aset tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya.
 - 3) Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengungkapan informasi lain, antara lain:

- 1) Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang dicapai oleh koperasi.
- 2) Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, serta penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.
- 3) Pembatasan penggunaan dan risiko atas aset tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
- 4) Aset yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
- 5) Aset yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
- 6) Pembagian Sisa Hasil Usaha dan penggunaan cadangan.
- 7) Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan.
- 8) Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. (Tuti:2009:26).

2. Konsep Dasar Pajak

3.1 Pengertian Pajak

Menurut pendapat Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, menyatakan sebagai berikut, “pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Thomas Sumarsan, 2013:3).

Menurut Djoko (2009:1) Akuntansi pajak merupakan akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan berserta aturan pelaksanaannya.

Adapun definisi yang diberikan oleh P. J. A. Andriani adalah sebagai berikut, “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. (Gatot S.M Faisal, 2009:12)

2.3.2 Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:1) dalam buku Perpajakan: Edisi Revisi, menuliskan bahwa ada dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang social dan ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mardiasmo (2011:2) menyebutkan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
- c. Tidak mengganggu perekonomian.
- d. Pemungutan pajak harus efisien.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem Pemungut Pajak:

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungut pajak banyak bergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Dalam

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungut pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak.

2.4 Pajak Penghasilan Badan

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pontoh (2013:461) menyatakan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan langsung dari penghasilan (laba) bersih sebuah organisasi bisnis (disebut pajak penghasilan badan) atau individu tertentu (disebut pajak penghasilan orang pribadi).

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (Mardiasmo 2011:135)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Zulfan (2016:24) Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 2, yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan

Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.

4. Bentuk usaha tetap

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. tempat kedudukan manajemen
- b. cabang perusahaan
- c. kantor perwakilan
- d. gedung kantor
- e. pabrik
- f. bengkel
- g. gudang
- h. ruang untuk promosi dan penjualan
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.4.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Zulfan (2016:28) Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan,

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran atau konsumsinya. Dalam Undang-undang No.36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) yang termasuk objek pajak adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba Usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak pihak yang bersangkutan; dan
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

Yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan badan menurut Undang undang No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) adalah:

- a) 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b) Warisan;

c) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagaipengganti penyertaan modal;

d) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak

yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- e) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j) Dihapus;
- k) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

- n) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4.4 Pengurang Penghasilan Bruto

Menurut Undang-undang PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) Biaya-biaya yang diperkenankan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha dalam menentukan penghasilan kena pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan, termasuk :

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. Biaya pembelian bahan.
 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, grafikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
 3. Bunga, sewa, dan royalty.
 4. Biaya perjalanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Premi asuransi.
6. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
7. Biaya administrasi.
8. Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak.
3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 - i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - k. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya di atur dengan Peraturan Pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-undang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) Biaya-biaya yang tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto dalam menentukan penghasilan kena pajak adalah :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 - 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk sauh kehutanan.
 - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbahindustri untuk usaha pengolahan limbah industry.

- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- h. Pajak Penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.4.5 Penghasilan Yang Dikenai Tarif Final

Menurut Undang-undang PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2)

Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.4.6 Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Supriyanto (2011: 132) Rekonsiliasi Fiskal adalah suatu proses penyesuaian-penyesuaian laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang undangan perpajakan di indonesia sehingga diperoleh laba/ rugi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan untuk satu tahun tertentu. koreksi fiskal dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya (pengurang penghasilan bruto).

a. Faktor-Faktor Penyebab Koreksi Fiskal

Menurut Resmi (2009: 392), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perbedaan prinsip akuntansi

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis tetapi tidak diakui dalam fiskal.

2. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi

- a. Metode penilaian persediaan.
- b. Metode penyusutan dan amortisasi.
- c. Metode penghapusan piutang.

3. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya.

- a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.
- b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final.
- c. Perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
 - Kerugian suatu usaha diluar negeri.
 - Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya.

4. Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga dalam SPT Tahunan PPh, merupakan koreksi fiskal positif. Contoh: diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

b. Jenis-Jenis Koreksi Fiskal

Jenis koreksi fiskal merupakan jenis-jenis perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal, yaitu terdiri dari :

1. Beda Tetap (*Permanent Differences*)

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Sehingga akan mengakibatkan laba/rugi menurut akuntansi (*pre tax Income*) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (*taxable income*).

2. Beda Waktu (*Timing Differences*)

Adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial tapi belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Biasanya perbedaan ini bersifat sementara. Perbedaan ini, diakibatkan oleh perbedaan metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal: Akrua! dan realisasi, Penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud, Penilaian persediaan, dan Kompensasi kerugian fiskal.

2.4.7 Penentuan Penghasilan Kena Pajak

Menurut Zulfan (2016:28) Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 9, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

8. Pajak Penghasilan.
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.4.8 Tarif Pajak

Menurut Zulfan (2016:32) Tarif pajak didefinisikan sebagai tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan biasanya merupakan presentase untuk diterapkan atas penghasilan neto. Ada 4 macam tarif pajak yang dijelaskan dalam buku Wirawan Ilyas dan Richard Burton (2010), yaitu:

1. Tarif pajak tetap (*Fixed Rate*)

Tarif pajak tetap adalah tarif yang jumlah pajaknya dalam rupiah (atau Dolar) bersifat tetap walaupun objek pajak jumlahnya berbeda-beda. Contohnya penerapan tarif pajak tetap adalah pada Bea Materai, di atur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa jumlah Bea Materai terhutang atas kuitansi atau tanda terima uang di atas Rp. 1.000.000,00 adalah sejumlah Rp. 6.000,00. Walaupun uang yang diterima jumlahnya lebih dari Rp. 1.000.000,00 jumlah Bea Materai yang terutang tetap Rp.6.000,00.

2. Tarif pajak proporsional (*Proporsional Rate*)

Tarif pajak proporsional adalah tarif yang persentasenya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah. Contohnya pada penerapan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Walaupun objek pajaknya naik ataupun turun, maka tarif yang dikenakan adalah tetap sebesar 10%.

3. Tarif pajak progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang makin tinggi objek pajaknya, makin tinggi pula presentase tarif pajaknya. Dalam hubungannya dengan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. Tarif progresif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Progresif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp	25%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

500.000.000,-	
di atas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber: Undang-undang No.36 tahun 2008

4. Tarif pajak regresif (*Regressive Rate*)

Tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang apabila objek pajaknya makin tinggi, maka makin rendah pula tarifnya. Tarif ini pernah berlaku untuk Bea Warisan. Makin tinggi warisan yang akan diterima ahli waris, maka tarif pajak atas warisan makin kecil. Tarif ini sudah tidak berlaku lagi di Indonesia.

2.4.9 Tarif Tunggal

Menurut Zulfan (2016:34) Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tanggal 23 September 2008 yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009 maka telah terjadi perubahan tarif pajak penghasilan. Dan tarif tersebut adalah sebagai berikut:

Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap tarif yang berlaku adalah tarif tunggal yaitu sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Menurut pasal 17 ayat (2a) tarif PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sejak tahun 2010 tarif tunggalnya berubah menjadi 25% (dua puluh lima persen).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari karakteristiknya, *Flat Rate* (di Indonesia dipergunakan istilah tarif tunggal) dapat digolongkan dalam jenis tarif proporsional. *Flat rate* untuk selanjutnya disebut tarif tunggal, adalah bentuk tarif yang presentase tarifnya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah.

Tarif jenis ini memiliki keutamaan dalam hal kesederhanaan dan mudah di aplikasikan. Banyak pendapat ahli yang berpendapat mengenai kelebihan dan kekurangan tarif yang bersifat flat ini. Kelebihan dari tarif proporsional ini yang menyebabkan menjadi efisien untuk digunakan adalah:

1. Sederhana (*simplicity*) dan mudah diaplikasikan
2. Menghilangkan pengecualian kecuali pengecualian pribadi dan celah-celah yang dapat dipergunakan untuk meminimalkan pajak.
3. Menghilangkan anti saving-bias yaitu menghilangkan terjadinya suatu kesalahan dalam sistematis tarif presentasinya.
4. Pajak tunggal akan lebih adil, mempercepat pertumbuhan ekonomi, global kompetitif, dapat meningkatkan efisiensi penagihan pajak, memudahkan dan menghemat waktu atas keberadaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dan akan menghentikan korupsi oleh pihak-pihak terkait.

5.5 Perkembangan Peraturan Pajak

Menurut Zulfan (2016:35) Peraturan perundang-undangan pajak bukanlah sesuatu yang statis tetapi selalu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Mengingat keadaan dunia usaha, masyarakat khususnya wajib pajak diharapkan memahami isi undang-undang terbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah dikompilasikan dengan undang-undang yang telah diundangkan sebelumnya. Hal ini terlihat sejak dikeluarkannya undang-undang pajak tahun 1983 sudah empat kali dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan yaitu 1991, 1994, 2000 dan 2008.

a. UU No. 7 Tahun 1983

UU No. 7 Tahun 1983, pada pasal 14 ayat (2) menjelaskan tentang Wajib Pajak yang peredaran usahanya atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebasnya yang berjumlah kurang dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan, asal hal itu diberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Tarif yang digunakan adalah (Pasal 17 ayat (1) :

Tabel 2.2
Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

PKP	Tarif
s.d Rp 10.000.000	15%
Rp10.000.000– Rp 50.000.000	25%
Diatas Rp 50.000.000	35%

Sumber: Undang-undang No.7 tahun 1983

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. UU No. 7 Tahun 1991

UU No. 7 Tahun 1991 merupakan perubahan pertama setelah dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1983. Namun pada UU No. 7 Tahun 1991, tidak terdapat perubahan mengenai tarif dan besarnya peredaran bruto.

c. UU No. 10 Tahun 1994

UU No. 10 Tahun 1994 merupakan perubahan kedua, terdapat perubahan besaran peredaran bruto dari Rp 60.000.000,- menjadi Rp 600.000.000,- dan perubahan pada tarif pengenaan pajak, yaitu:

Tabel 2.3
Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

PKP	Tarif
s.d Rp 25.000.000	10%
Rp25.000.000– Rp 50.000.000	15%
Diatas Rp 50.000.000	30%

Sumber: Undang-undang No.10 tahun 1994

d. UU No. 17 Tahun 2000

UU No. 17 Tahun 2000 merupakan perubahan ketiga, tidak terdapat perubahan pada peredaran bruto, tetap pada Rp 600.000.000,-. Pada tahun 2007, Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan baru No. 01/PMK.03/2007 yang isinya mengenai besarnya peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun bagi Wajib Pajak orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, diubah menjadi kurang dari Rp 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Pada pasal 17 ayat (1) tarif pajak pada perubahan ketiga ini dibedakan menjadi 2, yaitu untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

PKP	Tarif
s.d Rp 25.000.000	5%
Rp25.000.000-Rp50.000.000	10%
Rp 50.000.000-Rp100.000.000	15%
Rp100.000.000-Rp200.000.000	25%
Diatas Rp200.000.000	35%

Sumber: Undang-undang No.17 tahun 2000

Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Tarif Pajak Wajib Pajak Badan

PKP	Tarif
s.d Rp50.000.000	10%
Rp25.000.000– Rp100.000.000	15%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diatas Rp100.000.000	30%
----------------------	-----

Sumber: Undang-undang No.17 tahun 2000

e. UU No. 36 Tahun 2008

UU No. 36 Tahun 2008 merupakan perubahan keempat pada Undang-Undang Pajak. Perubahan terdapat pada pasal 14 ayat (2) yang isinya Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Perubahan juga terdapat pada pasal 17 ayat (1) yang menerangkan tentang tarif pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, yaitu:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

PKP	Tarif
s.d Rp50.000.000	5%
Rp50.000.000– Rp250.000.000	15%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rp250.000.000-Rp500.000.00	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber: Undang-undang No.36 tahun 2008

Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

Pada tahun 2010 tarif pajak bagi Wajib Pajak Badan pada pasal 17 ayat (1) huruf b diubah menjadi 25%. Kemudian pada UU No. 36 Tahun 2008 terdapat penambahan pasal 31 D dan pasal 31 E. Pada pasal 31 E menerangkan bahwa:

- a. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- b. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

5.1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Menurut Zulfan (2016:39) Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang

diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu baru saja terbit. Beberapa pokok-pokok penting yang diatur dalam PP yang diberlakukan efektif mulai 1 Juli 2013 tersebut adalah:

- a. Bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 milyar dalam 1 (satu) Tahun Pajak, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 1%.
- b. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
- c. Dikecualikan dari pengenaan PPh Final berdasarkan ketentuan ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diperoleh:
 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntansi, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari
 3. Olahragawan
 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 5. Pengarang, penelitian, dan penerjemah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Agen iklan
7. Pengawas atau pengelola proyek
8. Perantara

d. Tidak termasuk dalam pengertian Wajib Pajak yang dikenakan dengan PP ini adalah:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
 - a) Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap.
 - b) Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Contoh: pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.

2. Wajib Pajak badan:
 - a) Yang belum beroperasi secara komersial
 - b) Yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 milyar.
3. PP ini tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang selama ini telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan, penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hingga saat penulisan artikel ini, PMK dimaksud belum terbit.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013, tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa peraturan ini ditujukan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha Rp 4,8 milyar dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan dengan peredaran maksimum Rp 50 milyar dalam setahun.

Sebelumnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tariff sebesar 50% dari tariff umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 milyar. Dengan PPh Badan yang berlaku saat ini sebesar 25%. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak badan diwajibkan melakukan pembukuan.

Selama bulan September 2013 ini setidaknya terdapat beberapa peraturan perpajakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak. Berikut ini adalah daftar peraturan tersebut.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Surat Edaran Direktur Jenderal ini menjelaskan dengan lebih rinci mengenai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 seperti beberapa hal terkait teknis penyeteroran dan pelaporan yang sebelumnya tidak dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Salah satu contohnya Surat Edaran Direktur Jenderal ini mengatur tentang penghapusan sanksi administrasi terkait pemenuhan kewajiban pembayaran atau penyeteroran Pajak Penghasilan Final 4 (2) yang terutang bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto selama Masa Pajak Juli 2013 sampai dengan Masa Pajak Desember 2013. Sementara itu Peraturan ini menyebutkan terkait pemenuhan kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Final 4 (2) atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran brutotertentu, ketentuan yang mengatur tentang pelaporan Pajak Penghasilan Final 4 (2) ini akan diberlakukan mulai Masa Pajak Januari 2014.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 25 September 2013 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan Pasal 14 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 yang menjelaskan bahwa tata cara pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Peraturan ini mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 seperti:

- a. Kepada siapa permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan itu harus diajukan.
- b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jenis Pajak Penghasilan yang dapat diajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23.
- d. Jangka waktu bagi kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menerbitkan Surat Keterangan Bebas atau surat penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas yaitu 5 hari sejak permohonan diterima lengkap.
- e. Masa berlaku Surat Keterangan Bebas.
- f. Bentuk formulir yang dicontohkan pada lampiran dari peraturan ini.

Peraturan Pemerintah Republik Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperbolehkan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperbolehkan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 2

- (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
 - b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

(3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
- b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

(4) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 3

- (1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
- (2) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
- (2) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 7

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 8

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak;
- b. Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur sebagai berikut:

1. didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku;
3. didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

2.5.2.1 Subyek Pajak PP No 23 Tahun 2018

Mengutip forum pajak (<https://forumpajak.org/pajak-penghasilan-final-untuk-wajib-pajak-tertentu-pp-23-2018/>, diakses 17 Desember 2019), Subyek Pajak yang dapat menggunakan Peraturan ini adalah Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Adapun kelompok wajib pajak yang diperbolehkan menggunakan aturan ini adalah Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, sepanjang wajib pajak ini bukan :

- a. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (Za), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa yang dikecualikan sebagai objek pajak pada aturan PP 23 Tahun 2018.
- c. Wajib Pajak badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya: dan

- d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

2.5.2.2 Obyek Pajak PP No 23 Tahun 2018

Pada dasarnya semua penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, merupakan Obyek pajak penghasilan. Peraturan ini hanya memberi batasan jenis penghasilan yang dikecualikan sebagai Obyek pajak penghasilan final PP No 23 Tahun 2018, yaitu:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jenis jasa yang termasuk di sini adalah:
 - 1) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
 - 2) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru mm, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
 - 3) olahragawan;
 - 4) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5) pengarang, peneliti, dan penerjemah;agen iklan;
 - 6) pengawas atau pengelola proyek;
 - 7) perantara;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) petugas penjaja barang dagangan;
- 9) agen asuransi;
- 10) distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
- c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

2.5.2.3 Tarif PPh Final PP No 23 Tahun 2018

Tarif PPh Final PP 23 adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto.

Adapun cara menentukan peredaran bruto adalah sebagai berikut:

1. Peredaran bruto dihitung selama 1 tahun terakhir, sebelum tahun pajak yang bersangkutan.
2. Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan potongan tunai, dan/atau potongan sejenis
3. Untuk wajib pajak badan, peredaran bruto adalah jumlah omzet pusat dan cabang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Untuk wajib pajak orang pribadi berkeluarga, peredaran bruto adalah omzet suami dan istri.

1.5.2.4 Cara Penghitungan PPh Final PP No 23 Tahun 2018

PPh Final = $0,5\% \times$ peredaran bruto bulan bersangkutan. Prosedur dan Tata Cara PP No 23 Tahun 2018

1. Wajib Pajak yang tidak ingin menggunakan PP No 23 Tahun 2018 wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
2. Pajak yang terutang wajib dilunasi dengan cara setor sendiri setiap bulan atau melalui mekanisme pemotongan/pemungutan jika transaksi dilakukan kepada pemungut pajak. Jika menggunakan mekanisme pemungutan, wajib pajak harus memberikan surat keterangan sebagai wajib pajak PP No 23 dari Kantor Pelayanan Pajak kepada pemungut.
3. Wajib Pajak dapat menggunakan tarif PP No 23 (sepanjang masih memenuhi syarat) dalam jangka waktu:
 - a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma; dan
 - c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
4. Apabila di tengah tahun peredaran bruto sudah melebihi Rp 4,8 M, wajib pajak tetap menggunakan tarif PP No 23 sampai dengan tahun pajak bersangkutan berakhir. Pada tahun pajak berikutnya wajib pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hams menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (Za), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

5. Wajib Pajak yang sejak dari awal memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dapat menggunakan PP No 23 ini.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99 /PMK.03/2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Menteri Keuangan Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214);

Memutuskan

Menetapkan: Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

BAB I**Ketentuan Umum****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
4. Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
5. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/ atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
6. Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa Wajib Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

7. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
8. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

BAB II**Subjek Pajak****Pasal 2**

- (1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

(2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

- a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan;
- b. Wajib Pajak komanditer badan berbentuk persekutuan atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:

1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
2. Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya, dan d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

(3) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), penilai, dan aktuaris;
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- J. agen asuransi;
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

**Tata Cara Pemberitahuan Wajib Pajak Yang Memiliki Dikenai
Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan**

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar;
 - b. Kantor Pelayanan Penyulchan dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar; atau
 - c. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir Tahun Pajak dan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak berikutnya.
- (3) Bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Wajib Pajak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak terdaftar dengan cara menyampaikan pemberitahuan paling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lambat tanggal 31 Desember 2018 atau paling lambat akhir Tahun Pajak terdaftar.

- (4) Bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak tanggal 1 Januari 2019 dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak terdaftar dengan cara menyampaikan pemberitahuan pada saat mendaftarkan diri.

BAB IV**Tata Cara Penyetoran, Pemotongan Atau Pemungutan, Dan Pelaporan****Pasal 4**

- (1) Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilunasi dengan cara:
 - a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
 - b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.
- (2) Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk setiap tempat kegiatan usaha.
- (3) Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setiap bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) Wajib Pajak yang melakukan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (5) Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, Wajib Pajak tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa.
- (7) Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam kedudukan sebagai pembeli atau penyedia jasa melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen) terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan

b. Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.

(8) Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan yang melakukan transaksi:

a. impor; atau

b. pembelian barang, dan Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.

(9) Pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut serta ditandatangani oleh Pemotong atau Pemungut Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(10) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dan harus diberikan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak kepada Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut.

(11) Pemotong atau Pemungut Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atas pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong atau Pemungut Pajak terdaftar paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

BAB V**Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Penerbitan Surat Keterangan****Pasal 5**

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dan ayat (8) kepada Direktur Jenderal Pajak melalui:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar;
 - b. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib Pajak pusat terdaftar; atau
 - c. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Wajib Pajak dapat diberikan Surat Keterangan sepanjang telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- c. memenuhi kriteria Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (3) Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditiadakan untuk:
 - a. Wajib Pajak yang baru terdaftar; atau
 - b. Wajib Pajak yang tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 6

- (1) Atas permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan:
 - a. Surat Keterangan; atau
 - b. surat penolakan permohonan Surat Keterangan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati, permohonan dianggap diterima dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati.
- (3) Dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan sepanjang memenuhi persyaratan. Pasal 7 Surat Keterangan berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, kecuali:
 - a. Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan; dan/ atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan pembatalan atau pencabutan atas Surat Keterangan yang telah diterbitkan dalam hal berdasarkan penelitian ditemukan data bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
- (2) Tata cara pembatalan atau pencabutan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

BAB VI**Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan****Pasal 9**

- (1) Bagi Wajib Pajak yang:
 - a. memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak; atau

c. telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, wajib membayar Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 mulai Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan.

(2) Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut:

a. bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak tersebut; dan

b. bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penghitungan besarnya angsuran pajak diberlakukan seperti Wajib Pajak baru, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penghitungan besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Wajib Pajak baru, bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu.

BAB VII**Ketentuan Peralihan****Pasal 10**

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

1. Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 tidak memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, namun sejak tanggal 1 Juli 2018 memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak 2018 sepanjang Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat keterangan bebas atau legalisasi surat keterangan bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 beserta peraturan pelaksanaannya serta telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dan dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan dimaksud, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan bebas atau legalisasi surat keterangan bebas dimaksud dipersamakan kedudukannya dengan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, dan berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018; dan
 - b. Pemotong atau Pemungut Pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan.
3. Bagi Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat keterangan bebas atau legalisasi surat keterangan bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 beserta peraturan pelaksanaannya namun tidak dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan bebas atau legalisasi surat keterangan bebas dimaksud dipersamakan kedudukannya dengan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, dan berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pemotong atau Pemungut Pajak melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan.

4. Surat keterangan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diterbitkan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini:

a. Dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan kedudukannya dengan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini; dan

b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan kembali Surat Keterangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII**Ketentuan Penutup****Pasal 11**

Bentuk dokumen berupa:

- a. pemberitahuan Wajib Pajak menilahi dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - c. Surat Keterangan dan surat penolakan permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
- dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulru. berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 /PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 984), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Pajak dalam pandangan Islam

Menurut Widodo (2010 : 75) Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-Maks, atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak” atau suatu ketika bisa disebut Al-Kharaj, akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.

Secara etimologi, pajak berasal dari bahasa Arab yaitu *Dharibah*, yang artinya, mewajibkan, membebankan, menetapkan. Sedangkan menurut istilah, pajak (*dharibah*) merupakan beban tambahan yang dipikulkan kepada kaum Muslim, untuk kepentingan mereka sendiri, yang tidak terpenuhi oleh Negara dari sumber-sumber utama maupun sumber pendapatan sekunder lainnya. (Gusfahmi 2011:31)

Dalam Fiqih Islam telah ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak bila jumlah zakat tidak mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hak negara untuk meningkatkan sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya mewakili semua mazhab fiqih. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya dana zakat dipergunakan untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi secara efektif.

Hak ini dibela oleh para fuqaha berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

“Pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat” Semua khullafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (Widodo 2010:81).

Dalam Islam dikenal tiga sistem pajak yaitu:

1. *Jizyah* atau pajak kepala yang dikenakan kepada kafir zimmi, yaitu non muslim yang hidup dinegara/pemerintahan islam dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan pemerintah islam untuk melindungi jiwa, keselamatan, kemerdekaan dan hak-hak asasi mereka. Dalam menghadapi negara non islam terdapat tiga pilihan yang ditawarkan islam. (1) masuk islam, (2) membayar *jizyah* atau (3) diperangi. Bagi yang masuk islam mereka aman, tidak diperangi dan tidak ada kewajiban membayar *jizyah*. Bagi yang tidak mau masuk islam ada dua pilihan yaitu membayar *jizyah* atau diperangi.
2. *Kharaj*, yaitu pajak bumi. Ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh para pemiliknya. Sebagai imbalannya maka pemiliknya mengeluarkan pajak bumi kepada pemerintah islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Usyur*, yaitu pajak perdagangan, atau bea cukai (pajak Impor dan Ekspor). Mengingat bahwa kebutuhan biaya pembangunan dalam arti luas sangat besar termasuk jalannya roda pemerintahan, maka dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat ditopang oleh zakat semata, islam membenarkan pemungutan pajak.

Dalam Islam, masalah pembayaran pajak merupakan salah satu yang cukup serius diperhatikan. Hal ini mengingat pembayaran pajak dapat membantu mensejahterakan masyarakat luas jika disalurkan dengan baik dan benar. Pentingnya membayar pajak juga diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-qur'an bahwa orang yang tidak mau membayar pajak atau *jizyah* boleh diperangi karena mereka tergolong orang-orang yang tidak beriman.

Firman Allah:

Q.S.At-Taubah ayat 29 yang berbunyi

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Q.S.Hud ayat 85 yang berbunyi

وَيَا قَوْمِ أَوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُّوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ

Artinya: dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Yang dimaksud dengan “Jizyah” adalah pajak perkepala yang dipungut oleh Pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Kaum muslimin sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman (definisi) yang jelas tentang pajak menurut pandangan atau pemahaman islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai suatu ibadah. Jika hal itu bukan perintah, tentunya ia tidak termasuk ibadah.

2.7 Penelitian Terdahulu

Adapun berikut ini penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Yuyun, Grace dan Novi (2019) dalam penelitian dengan judul Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Penghitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT Empat Tujuh Abadi Jaya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa perusahaan akan lebih diuntungkan jika menerapkan PP No. 23 Tahun 2018 adalah sebesar Rp23.347.000,00.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan apabila dengan menerapkan UU No. 36 Tahun 2008, jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh PT Empat Tujuh Abadi Jaya adalah sebesar Rp34.135.000,00. Dengan PP No. 46 Tahun 2013 adalah sebesar Rp46.694.000,00.

2. P. Helen Widjaja Dan Jason Pratama (2017) yang berjudul Analisis Perbandingan Beban Pajak Penghasilan Terhutang Menurut Pasal 31e Undang Undang Pajak Penghasilan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Pt Abc. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang diterbitkan oleh pemerintah lebih menguntungkan bagi PT. ABC, karena: (1) Untuk tahun pajak 2014, apabila menggunakan perhitungan dengan Pasal 31E UU PPh akan didapat beban pajak penghasilan terhutang sebesar Rp 12.446.750,00. Dan apabila menggunakan perhitungan menurut Peraturan Pemerintah nomor 46 akan didapat beban pajak penghasilan sebesar Rp 8.594.894,00; (2) Untuk tahun pajak 2015, apabila menggunakan perhitungan dengan Pasal 31E UU PPh akan didapat beban pajak penghasilan terhutang Rp 15.645.625,00. Dan apabila menggunakan perhitungan menurut Peraturan Pemerintah nomor 46 akan didapat beban pajak penghasilan sebesar Rp13.138.389,00.
3. Restu Widiarti (2017) dengan penelitian mengenai Analisis Sebelum Dan Sesudah Penerapan PP No 46 Tahun 2013 Terhadap Besarnya Pembayaran PPh Terutang Pr. Cengkir Gading Pada Tahun 2014 – 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

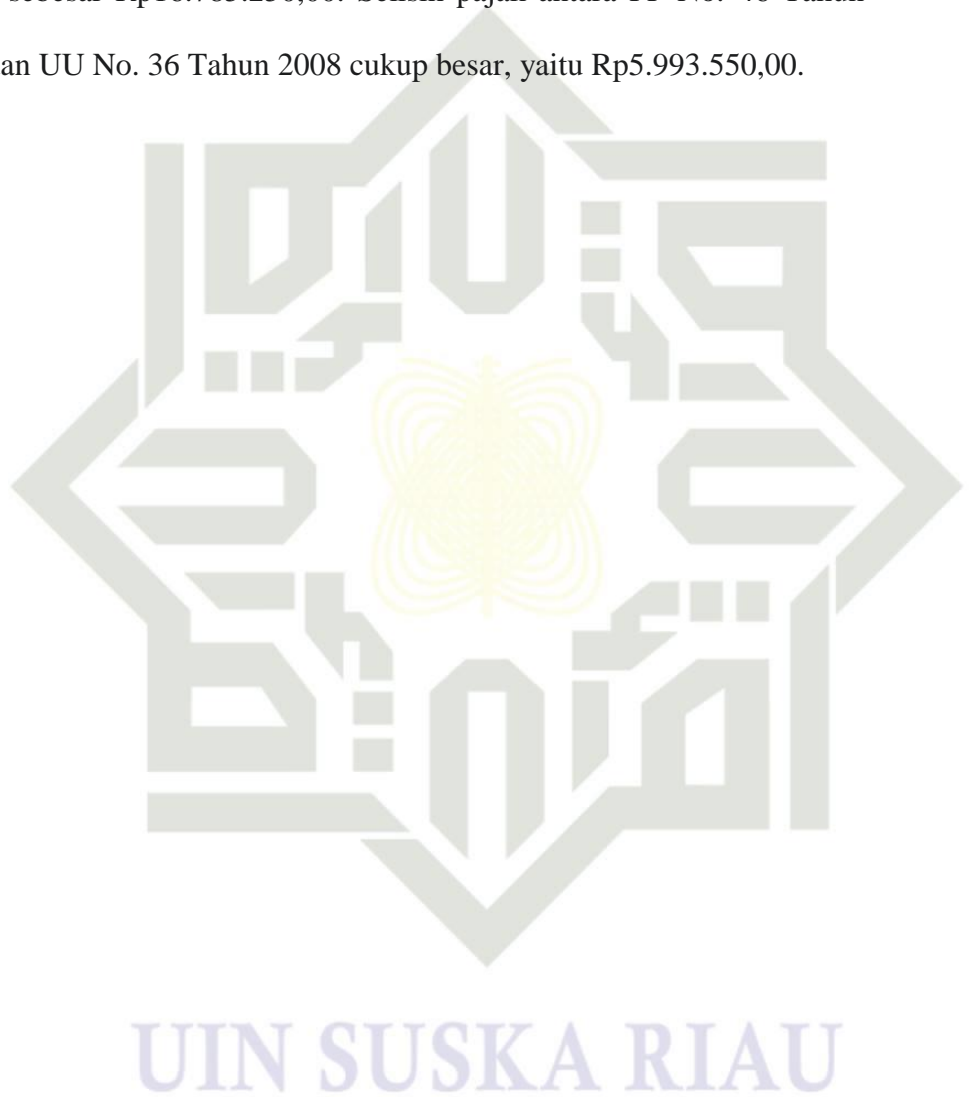
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil perbandingan besar PPh terutang PR. Cengkir Gading Nganjuk pada tahun 2014-2016 jika menggunakan perhitungan PP No 46 tahun 2013 dan UU 36 tahun 2008 didapatkan hasil bahwa PPh terutang PR. Cengkir Gading Nganjuk lebih kecil bila menggunakan skema perhitungan PP No 46 tahun 2013. Hal ini dikarenakan tarif PPh terutang PP No 46 tahun 2013 langsung dikenakan ke omzet bulanan wajib pajak maka setiap bulannya mereka harus membayar pajak terutang sehingga PPh terutang mereka tidak terlalu besar.

4. Haryati dan Noviari (2016) yang berjudul Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah N0 46 Tahun 2013 Pada Besarnya Pajak Penghasilan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif, hasil penelitian menunjukkan jumlah pajak penghasilan PT. XYZ dengan menerapkan PP No. 46 Tahun 2013 adalah sebesar Rp6.415.800,00. Sedangkan dengan menerapkan UU No. 36 Tahun 2008, jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh PT. XYZ adalah sebesar Rp0 karena adanya kerugian yang dialami oleh PT. XYZ.
5. Sindari, Dianaswara dan Arniati (2015) yang berjudul Analisis Perbandingan PP No 46 Tahun 2013 Dengan UU No 36 Tahun 2008 Pada PT. Trio Infotek Batam. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaanakan lebih

diuntungkan jika menerapkan PP No. 46 Tahun 2013. Pajak PT. Trio Infotek Batam dengan menerapkan PP No. 46 Tahun 2013 adalah sebesar Rp10.791.700,00, sedangkan apabila menerapkan UU No. 36 Tahun 2008 adalah sebesar Rp16.785.250,00. Selisih pajak antara PP No. 46 Tahun 2013 dan UU No. 36 Tahun 2008 cukup besar, yaitu Rp5.993.550,00.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di koperasi Harapan Mulya Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu.

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang berasal langsung dari objek penelitian atau responden, baik individu maupun kelompok. Kualitas data primer dapat dikontrol secara langsung oleh peneliti, karena peneliti memahami secara langsung proses pengumpulan datanya. (Chandrarini 2017 : 123). Pada penelitian ini data yang diperoleh langsung dari koperasi berupa sejarah singkat koperasi dan kegiatan koperasi.
2. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari pihak atau lembaga yang telah menggunakan atau mempublikasikannya. Pada penelitian ini digunakan data yang telah siap diolah antara lain Laporan Hasil Usaha, Laporan Peredaran Bruto, dan struktur organisasi.

3.3 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*), yaitu dengan mengadakan tanya-jawab dengan pengurus koperasi.
2. Dokumentasi, dokumentasi dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian, yaitu dengan mencatat, menyalin, dan menggandakan data-data informasi, yang

meliputi gambaran umum Koperasi Unit Desa, dan laporan keuangan Koperasi Unit Desa yang berupa Laporan Hasil Usaha, Laporan Peredaran Bruto, struktur organisasi dan kegiatan perusahaan.

3.4 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data dan melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Dan Sesudah Penerapan PP No 23 Tahun 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1V

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Koperasi

Koperasi Harapan Mulya berdiri pada tahun 2004, sebelum berdirinya koperasi Harapan Mulya ada beberapa kelompok tani yang menggarap lahan pertaniannya secara manual dan tidak efisien. Maka dari itu dari beberapa kelompok tani tersebut bermusyawarah dan mufakat untuk mencari Bapak Angkat yang bisa lahan Perkebunan tersebut di olah secara bagus dan maksimal oleh karena itu, sepakatlah PT.Perdana Inti Sawit Perkasa sebagai Bapak Angkat dengan pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota sehingga di didirikan koperasi Hapan Mulya.

4.2 Visi dan Misi

4.2.1 Visi

Menjadikan Koperasi Harapan Mulya sebagai wadah kegiatan usaha ekonomi anggota koperasi.

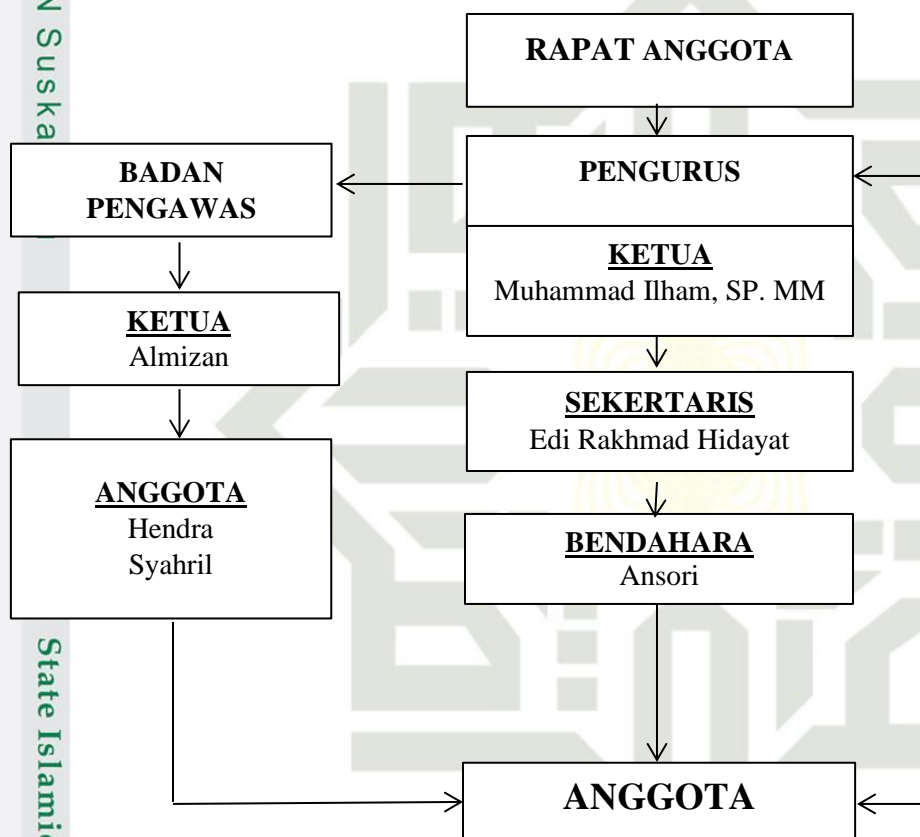
4.2.2 Misi

- a. Meningkatkan pelayanan terhadap anggota koperasi.
- b. Meningkatkan kerja sama pengurus dan anggota dalam menjalankan usaha koperasi dengan berbagai kemudahan.
- c. Meningkatkan pinjaman modal usaha anggota dengan suku bunga relative rendah.

4.3 Struktur Organisasi

Organisasi pada dasarnya merupakan desain untuk melakukan alokasi sumber daya yang dimiliki.

Struktur Organisasi Koperasi Harapan Mulya



Melihat struktur organisasi koperasi Koperasi Harapan Mulya dapat

duraikan lebih jelasnya tugas dan wewenang dari masing-masing fungsi yaitu:

Rapat Anggota

Rapat Anggota mempunyai beberapa tugas yang dapat ditetapkan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Anggaran dasar
2. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, usaha koperasi.
3. Pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian pengurus dan pengawas.
4. Pembagian sisa hasil usaha dan lainnya.

b. Pengawasan

Pengawas koperasi mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawas.
3. Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - 1) Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
 - 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

c. Ketua

Ketua koperasi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi.
2. Memimpin dan mengontrol jalannya aktivitas koperasi.
3. Mengambil keputusan atas hal-hal penting.

d. Pengurus

Pengurus Koperasi bertanggung jawab kepada ketua koperasi dan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun strategi dan kebijakan pengelolaan SDM di koperasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengkoordinasi dan mengontrol penyusunan dan pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan untuk memastikan tercapainya target tingkat kemampuan setiap anggota.
3. Menyusun sistem manajemen kinerja, serta mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan siklus manajemen kerja.
4. Mengatur surat menyurat yang ada dalam koperasi.
5. Mempersiapkan rapat-rapat dikoperasi.
6. Menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan koperasi.
7. Bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas.

e. Anggota

Hak dan kewajiban anggota koperasi setelah masuk menjadi anggota koperasi adalah mematuhi aturan yang ditetapkan dalam AD/ART organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

- a. Berdasarkan wawancara dan analisis yang penulis lakukan pada data Keuangan Koperasi Harapan Mulya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Koperasi Harapan Mulya sebelum di terapkan PP No 23 Tahun 2018 dikenakan pajak penghasilan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PP No 46 tahun 2013. Besarnya PPh terutang yang dibayar oleh Koperasi Harapan Mulya untuk tahun 2018 dengan menggunakan PP 46 tahun 2013 lebih kecil daripada PPh terutang jika menggunakan UU 36 tahun 2008.
- b. Setelah di terapkan PP No 23 Tahun 2018 Koperasi Harapan Mulya masih menggunakan PP No 46 tahun 2013 dengan tarif 1% yaitu pada tahun 2019 atas pendapatnya sebesar Rp.132.520.000 di kenakan pajak sebesar Rp.1.325.200. Namun jika melihat Peraturan Pemerintah sekarang atas Pph final untuk usaha mikro kecil menengah yaitu PP No 46 Tahun 2013 telah berubah menjadi PP No 23 Tahun 2018. Jadi kopeasi harapan mulya seharusnya sudah dikenakan pajak atas PP No 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5%.
- c. Koperasi Harapan Mulya lebih dimudahkan dan diuntungkan jika perhitungan PPh terutang menggunakan PP No 23 tahun 2018, yaitu atas pendapatnya sebesar Rp.132.520.000 di kenakan pajak sebesar

Rp.662.600. Tentu lebih menguntungkan bagi koperasi sehingga dapat mengurangi pengeluaran.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi koperasi maupun peneliti selanjutnya, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bagi Instansi

Koperasi Harapan Mulya dapat segera mengajukan atas pengenaan Pph final yang di terima yaitu dari dikenakan PP No 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% menjadi PP No 23 Tahun 2018 dengan tariff 0,5%. Sehingga dapat mengurangi pengeluaran koperasi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian yang sama, dalam melakukan penelitian dibidang Perpajakan masih banyak ruang kosong. Disarankan untuk melakukan pengujian dalam ruang lingkup yang lebih besar dan menambah pembahasan dan penelitian tentang Pengenaan Pajak terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah yang tergolong usaha kecil atau mikro.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

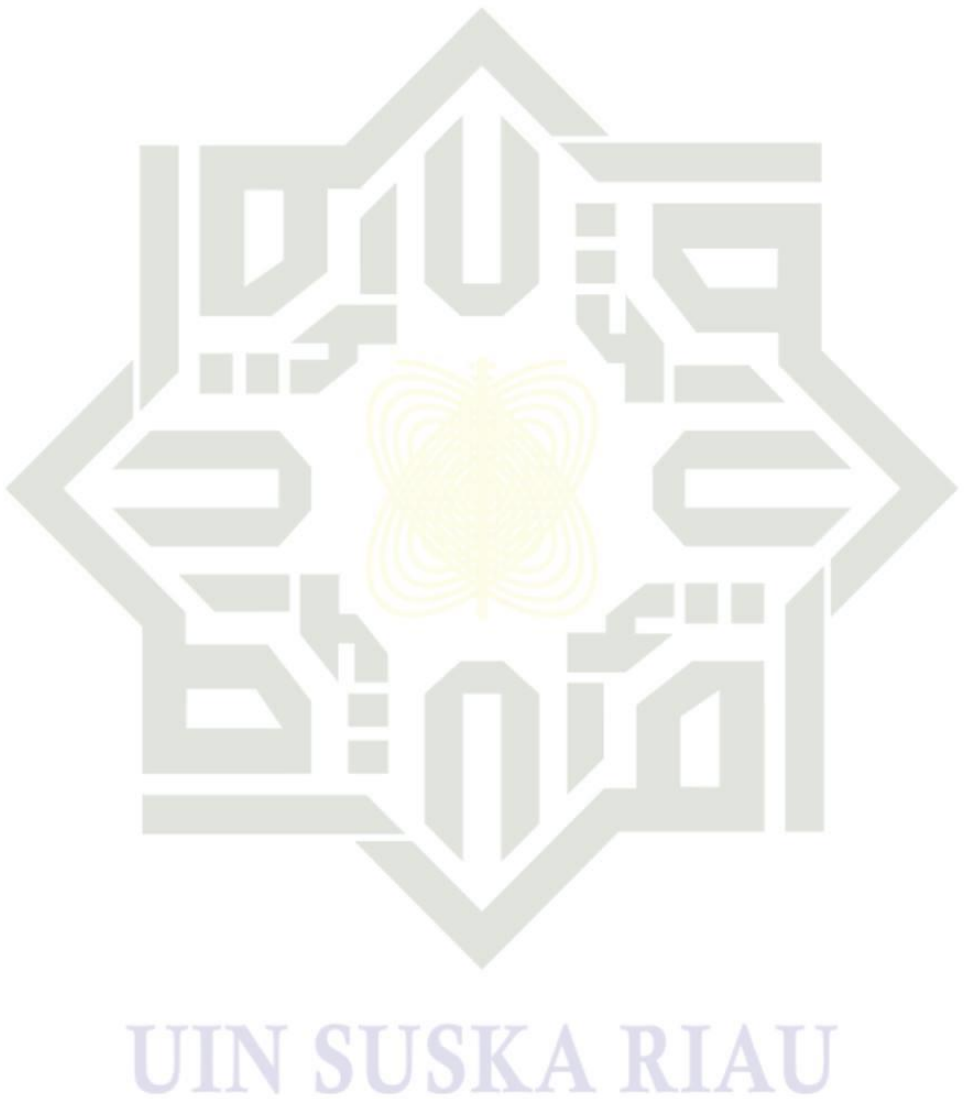
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansharullah. 2013. *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*. Pekanbaru: Cerdas Press.
- Al-Qur'an dan Terjemahan, At-Taubah:29.
- Al-Qur'an dan Terjemahan, Hud:85.
- David Sukardi Kodrat, Kurniawan Indonanjaya. 2010. *Manajemen Investasi: Pendekatan Teknikal dan Fundamental untuk Analisis Saham*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Eddy, Supriyanto. 2011. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Faisal, Gatot. 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer? Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Forum Pajak. 2018. "*Pajak Penghasilan Final untuk Wajib Pajak Tertentu (PP 23 2018)*". (<https://forumpajak.org/pajak-penghasilan-final-untuk-wajib-pajak-tertentu-pp-23-2018/>) (diakses 17 Desember 2019).
- Grahita, Chandrarin. 2017. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak menurut Syariah* : Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hery. 2009. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Kencana.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lubis, Arfan Ikhsan, dkk. 2017. *Teori Akuntansi*. Medan: Madenatera.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- M. Sadeli, Lili. 2006. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Bumi Aksara.
- Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: Andi.
- Nayla. 2013. *Cara Praktis menyusun Laporan Keuangan*. Jakarta Selatan: Laksana.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Jakarta Barat: Halaman Moeka.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subandi. 2015. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3, Pedoman Perpajakan yang lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru. Jakarta: PT Indeks.
- Widodo, Widi dkk. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Zulfan. 2016. "*Analisis Komparasi Pajak Terutang Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pph Final 1 % Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah*".



(UMKM) Sesuai PP No. 46 Tahun 2013 (Studi Kasus Kota Sawahlunto)". Skripsi. Ekonomi, Akuntansi, Universitas Andalas, Padang.

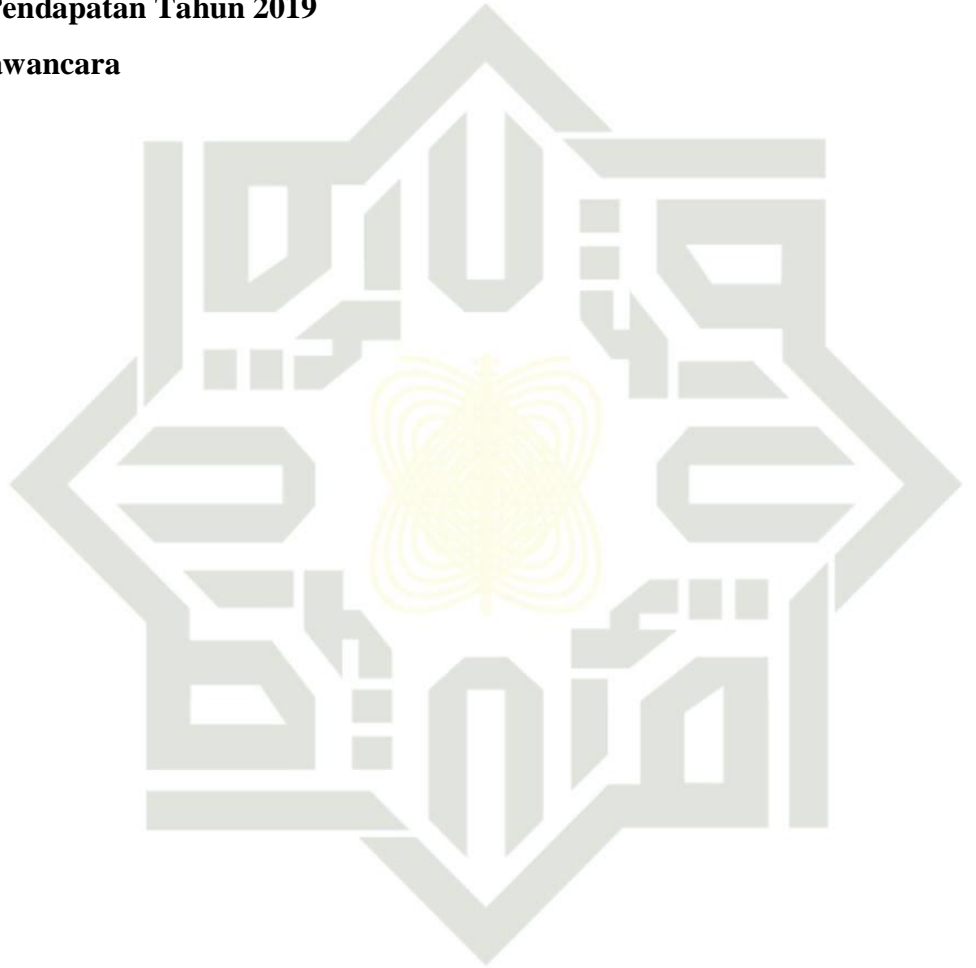
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

1. Laporan Perhitungan Hasil Usaha Tahun 2018
2. Laporan Pendapatan Tahun 2018
3. Laporan Perhitungan Hasil Usaha Tahun 2019
4. Laporan Pendapatan Tahun 2019
5. Daftar Wawancara



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta D

© H a c

Lampiran 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rif Kasim Riau



KOPERASI HARAPAN MULYA

KELURAHAN KEPENUHAN TENGAH KECAMATAN KEPENUHAN

KABUPATEN ROKAN HULU

BADAN HUKUM NO:KPTS:28/518/KOP/VI/2004 TANGGAL 23 JUNI 2004

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

PER 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2018

URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
PENDAPATAN			
Fee Koperasi	Rp.216.130.300		
SisaKas	Rp.427.814.000		
Total Pendapatan		Rp.643.944.300	
PENGELUARAN			
PajakPph Final		Rp.2.161.300	
IntensifPengurus			
IntensifKetua		Rp.19.200.000	
IntensifWakilKetua		Rp.14.400.000	
IntensifSekretaris		Rp.12.000.000	
IntensifWakilSekretaris		Rp.9.600.000	
IntensifBendahara		Rp.18.000.000	
IntensifKetuaBadanPengawas		Rp.6.000.000	
IntensifAnggotaBadanPengawas		Rp.6.000.000	
AlatTulis Kantor		Rp.58.050.000	
MakanMinumTamu		Rp.42.500.000	
Biaya lain-lain		Rp.12.000.000	
BiayaPenyelenggaraan RAT		Rp.3.000.000	
Total Pengeluaran		Rp.222.911.300	
			Rp.421.033.000





KOPERASI HARAPAN MULYA

KELURAHAN KEPENUHAN TENGAH KECAMATAN KEPENUHAN

KABUPATEN ROKAN HULU

BADAN HUKUM NO:KPTS:28/518/KOP/VI/2004 TANGGAL 23 JUNI 2004

LAPORAN PENDAPATAN

PER 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2018

BULAN	PENDAPATAN
Januari	Rp.18.020.000
Februari	Rp.19.050.000
Maret	Rp.21.000.000
April	Rp.19.060.000
Mei	Rp.20.030.000
Juni	Rp.20.160.000
Juli	Rp. 25.070.000
Agustus	Rp.18.040.000
September	Rp.20.190.000
Oktober	Rp.15.070.000
November	Rp.12.040.000
Desember	Rp.8.400.000
Total	Rp.216.130.000



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta D

© Ha c

Lampiran 3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arif Kasim Riau



KOPERASI HARAPAN MULYA

KELURAHAN KEPENUHAN TENGAH KECAMATAN KEPENUHAN

KABUPATEN ROKAN HULU

BADAN HUKUM NO.KPTS:28/518/KOP/VI/2004 TANGGAL 23 JUNI 2004

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

PER 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2019

URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
PENDAPATAN			
Fee Koperasi	Rp.132.520.000		
SisaKas	Rp.263.662.100		
Total Pendapatan		Rp.396.182.100	
PENGELUARAN			
PajakPph Final		Rp.1.325.200	
IntensifPengurus			
IntensifKetua		Rp.19.200.000	
IntensifWakilKetua		Rp.14.400.000	
IntensifSekretaris		Rp.12.000.000	
IntensifWakilSekretaris		Rp.9.600.000	
IntensifBendahara		Rp.18.000.000	
IntensifKetuaBadanPengawas		Rp.6.000.000	
IntensifAnggotaBadanPengawas		Rp.6.000.000	
AlatTulis Kantor		Rp.36.000.000	
MakanMinumTamud		Rp.9.000.000	
Biaya lain-lain		Rp.11.500.000	
BiayaPenyelenggaraan RAT		Rp.3.000.000	
Total Pengeluaran		Rp.146.025.200	
			Rp.250.156.900





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KOPERASI HARAPAN MULYA

KELURAHAN KEPENUHAN TENGAH KECAMATAN KEPENUHAN

KABUPATEN ROKAN HULU

BADAN HUKUM NO:KPTS:28/518/KOP/VI/2004 TANGGAL 23 JUNI 2004

LAPORAN PENDAPATAN

PER 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2019

BULAN	PENDAPATAN
Januari	Rp.12.070.000
Februari	Rp.23.080.000
Maret	Rp.9.000.000
April	Rp.9.000.000
Mei	Rp.8.700.000
Juni	Rp.6.670.000
Juli	Rp.8.660.000
Agustus	Rp.9.030.000
September	Rp.9.480.000
Oktober	Rp.17.040.000
November	Rp.9.800.000
Desember	Rp.9.990.000
Total	Rp.132.520.000





Gambaran 5

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya koperasi ini?

Koperasi Harapan Mulya berdiri pada tahun 2004, sebelum berdirinya koperasi Harapan Mulya ada beberapa kelompok tani yang menggarap lahan pertanian nya secara manual dan tidak efisien .Maka dari itu dari beberapa kelompok tani tersebut bermusyawarah dan mufakat untuk mencari Bapak Angkat yang bisa lahan Perkebunan tersebut di olah secara bagus dan maksimal oleh karena itu, sepakatlah PT. Perdana Inti Sawit Perkasa sebagai Bapak Angkat dengan pola KKPA sehingga di didirikan koperasi Hapan Mulya.

2. Apa visi dan misi koperasi ini?

Visi

Menjadikan koperasi harapan mulya sebagai wadah kegiatan usaha ekonomi anggota koperasi.

Misi

- Meningkatkan pelayanan terhadap anggota koperasi.
- Meningkatkan kerja sama pengurus dan anggota dalam menjalankan usaha koperasi dengan berbagai kemudahan.
- Meningkatkan pinjaman modal usaha anggota dengan suku bunga relative rendah.

3. Apakah koperasi ini menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak Badan untuk membayar Pajak Penghasilan?

Ya, koperasi harapan mulya setiap tahun membayar pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah pada tahun 2018 koperasi harapan mulya dikenakan Pajak atas Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013?

Iya, koperasi harapan mulya dikenakan pajak atas Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dengan tariff pajak sebesar 1%.

5. Berapa besar pajak yang dibayar Koperasi harapanmulya untuk tahun 2018 atas pajak Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013?

Padatahun 2018 Pendapatan Koperasi Harapan Mulya sebesar Rp216.130.000 dan pajak yang dibayar sebesar Rp2.161.300.

6. Apakah pada tahun 2019 koperasi harapan mulya dikenakan Pajak atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018?

Tidak, koperasi harapan mulya tidak dikenakan Pajak atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, tetapi masih dikenakan Pph final dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013.

7. Berapa besar pajak yang dibayar Koperasi harapan mulya untuk tahun 2019 atas pajak Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013?

Padatahun 2019 Pendapatan koperasi harapan mulyase besar Rp.132.520.000 dan pajak yang dibayar sebesar Rp.1.325.200.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Apakah koperasi harapan mulya mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
Tidak, koperasi harapan mulya belum mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
9. Apakah ada sosialisasi dari kantor pajak tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
Tidak ada.

Ketua Koperasi

Muhammad Ilham,




UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4185/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 04 Desember 2020 M
18 Rabiul Akhir 1442 H

Kepada
Yth. Koperasi Harapan Mulya Kepenuhan Tengah Rokan Hulu
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nani Yumiarti
NIM. : 11673200079
Jurusan : Akuntansi
Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Dan Sesudah
Penerapan Pp No 23 Tahun 2018 Pada Koperasi Harapan Mulya Kelurahan
Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu" Untuk itu kami mohon kiranya
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KOERASI HARAPAN MULYA

KELURAHAN KEPENUHAN TENGAH

BADAN HUKUM NOMOR: KPTS-28/518/KOP/VI/2004 TANGGAL 23 JUNI 2004
Alamat : Jalan Syech Abdul Wahab Rokan

SURAT KETERANGAN

Nomor: 40 /KOP -HARYA /XII/2020

Sehubung dengan surat dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor: Un .04/F.VII/PP.00.9/4185/2020, hal izin Riset Mengadakan Penelitian tertanggal 15 Oktober 2020, maka Kepala Koperasi Harapan Mulya dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama	:Nani Yumiarti
NIM	:11673200079
Jurusan	:Akuntansi
Prodi	:EkonomidanIlmuSosial
Jenjang	:S1

Benar telah mengadakan penelitian di Koperasi Harapan Mulya pada tanggal 15 Oktober 2020 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul "**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Dan Sesudah Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Pada Koperasi Harapan Mulya Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu**".

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Kepenuhan Tengah, 10 Desember 2020

Ketua Koperasi,



Muhammad Ilham, SP. MM

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Assalamua'laikum Wr. Wb



Nani Yumiarti, kelahiran Kepenuhan Raya 21 april 1998. Beralamat di Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Merupakan anak dari pasangan Bapak Rosidi dan Ibu Kasmana. serta anak keenam dari delapan bersaudara. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan TK di TK PERTIWI Kepenuhan Raya pada tahun 2004. Selanjutnya menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di SD N 013 Kepenuhan Raya pada tahun 2010. Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SLTP di SMP N 3 Kepenuhan pada tahun 2013. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA di SMK N 1 Kepenuhan pada tahun 2016, dan kini penulis menyelesaikan tingkat Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Jurusan Akuntansi S1 pada tahun 2020. Selama menjadi mahasiswi penulis menamatkan Beasiswa Bidikmisi pada semester 1 sampai semester 8. Penulis juga melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) semester VI di Kantor UP Sasat Kepenuhan dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) semester VII di Desa Lubuk Kerapat, Kecamatan Kepenuhan.

Alhamdulillah atas berkat dan ridho Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul yaitu “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Pada Koperasi Harapan Mulya Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu”. Dibawah bimbingan Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak dan resmi lulus dengan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) tanggal 17 Desember 2020.